

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika isu-isu kontemporer telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan hubungan internasional. Isu kemiskinan, pembangunan, kesetaraan gender, menjadi kekhawatiran global yang dirumuskan melalui poin-poin *Sustainable Development Goals* (SDG) sebagai bentuk norma yang harus diselaraskan oleh kebijakan setiap negara. Permasalahan kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, seringkali dikorelasikan kepada negara-negara berkembang, terutama negara dunia ketiga. India menjadi salah satu negara dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang ekstrim di dunia ditunjukkan dengan kontrasnya kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, kaum menengah ke bawah, terutama perempuan tidak mendapatkan porsi pekerjaan yang setara dengan laki-laki, sebab tingkat patriarkis yang masih tinggi bahkan dalam lingkup pekerjaan turut menjadi perhatian bahwa isu gender menjadi masalah inti dalam keterbelakangan angka pekerja wanita (Agarwal, 1985).

Agama dan sosial menjadi tantangan bagi pemerintah India dalam memerangi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Adanya segregasi dalam sektor pekerjaan merupakan dampak berkelanjutan dari sosiokultural India dalam pemenuhan hak dan kewajiban pria dan wanita. Hal ini menjadi penting ketika pemerintah India memiliki keterbatasan dalam meruntuhkan stigma internasional yang ditujukan kepada India dalam perlindungan hak

perempuan akibat dari dampak sosio kultural tersebut. India menghormati *personal law* yang tumbuh di masyarakat sehingga pemerintah tidak mengintervensi hal yang menjadi urusan pribadi masyarakat tanpa persetujuan pihak yang terlibat (Rautenbach, 2006, 241-264).

Berdasarkan data World Bank, kesenjangan yang sangat kontras ditunjukkan pula pada melebarnya jarak partisipasi pekerja perempuan di seluruh Asia Selatan dengan perbandingan 22% wanita dan 71,8% adalah laki-laki. Di India, sejak tahun 1990 sampai dengan 2020 angkatan kerja perempuan yang aktif secara ekonomi hanya berada pada angka 19,2% sedangkan laki-laki berada pada persentase 70,1%. Perempuan India memiliki keterbatasan dalam melakukan mobilisasi profesi dan hanya terbatas pada sektor agrikultur. Hal ini ditunjukkan pada basis data NSSO (National Sample Survey Organization) yang di rilis pada penelitian yang berfokus pada distribusi sumber daya di wilayah pedesaan India. Perempuan memperoleh porsi terhadap lapangan pekerjaan paling banyak bekerja pada sektor agrikultur dibanding laki-laki. Mulai tahun 1972-2005 angka partisipasi pria dalam agrikultur menunjukkan penurunan hingga pada angka 66.5% sedangkan perempuan masih berkutat pada angka 80%, sebab masa kolonialisme memasuki abad ke-19 hingga abad ke-20, pekerja perempuan dieksploitasi melakukan tugas-tugas sulit dan mengalami kerja paksa dalam sektor industri, maupun pekerja seks (SRIVASTAVA & SRIVASTAVA, 2010). Industri rumah tangga tekstil akan dikepalai oleh kepala keluarga atau suami, sementara istri dan anak-anak akan mengambil bagian dalam proses pemintalan dan penenunan (Lanzillo & Kumar,

2021).

Oleh karena perempuan terbatas ruang geraknya pada sektor agrikultur dan domestik, hal ini memantik permasalahan mengenai mobilisasi profesi perempuan di India. Mobilisasi merupakan kemampuan seseorang dalam bergerak bebas, mudah, dan bertujuan dalam memenuhi kesejahteraan hidup. Sementara profesi adalah pekerjaan yang dimiliki seseorang yang berdasar pada keahlian atau kemampuan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mobilisasi profesi merupakan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang dalam memperoleh profesi atau pekerjaan yang sesuai dengan kinerja dan memperoleh kemampuan dalam melakukan perpindahan profesi itu sendiri. Namun, perempuan pedesaan yang bermigrasi ke daerah perkotaan sendirian secara tradisional tetap sulit untuk mendapatkan kesempatan profesi lebih layak dari strata sosial ekonomi terendah (Kibria, 1998). Oleh karena itu, upaya mobilisasi berfokus pada penghancuran batas yang menjadi penghalang bagi perempuan dalam melakukan perpindahan profesi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ketenagakerjaan.

Perempuan sulit melakukan perpindahan profesi dari sektor agrikultur menuju non-agrikultur disebabkan oleh kepemilikan ladang berada pada tingkat rumah tangga atau keluarga sehingga perempuan dipercaya dapat mengelola ladang tersebut sementara laki-laki akan bekerja di kota. Selain pada pengekangan, perempuan yang bekerja di ladang keluarga tidak mendapatkan upah dari hasil pertanian mereka (Lei, Vanneman, & Desai, 2019). Selain pada kekurangan modal terhadap akses produktif, laporan ILO (*International Labour*

Organization) menunjukkan bahwa perempuan India yang bekerja pada sektor manajerial mendapatkan upah yang tidak seimbang terhadap laki-laki dengan kesenjangan sebesar 34% sehingga menyebabkan *glass ceiling effect* dalam iklim korporat di India. Sementara berkaca pada norma sosial yang dibangun oleh masyarakat konservatif India, perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga bertentangan dengan mobilitas dan partisipasi perempuan di sektor non-agrikultur. Terutama ketika kondisi perekonomian keluarga meningkat atau perempuan akan menikah, maka pengaruh budaya yang kuat tersebut menekan perempuan untuk berhenti bekerja (INSIGHTIAS, n.d.). Keadaan perempuan terbelakang di India terbentur antara kasta, ketimpangan gender, dan kelas sosial dalam kemakmuran ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi atau rendah kasta seseorang, maka nilai konservatif dalam norma gender akan berbanding lurus sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kelas sosial masyarakat dalam perolehan pendapatan. (Dasgupta & Datta, 2022).

Namun, ahli ekonom Tirthankar Roy yang melakukan penelitian terhadap ketimpangan pendapatan di India mengatakan bahwa kekuasaan Inggris telah merevolusi bahan ekspor India dari tekstil menjadi agrikultur dan hal tersebut memberikan kemajuan bagi pendapatan India (Kwatra, 2018). Sedangkan pada International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa terdapat penurunan angka partisipasi pekerja wanita sebesar 37% di tahun 2004-2005 menjadi 29% di tahun 2009-2010. Dalam rentang lima tahun, total partisipasi pekerja perempuan di India tidak mengalami eskalasi maupun stagnasi. Persentase yang disajikan ILO (*International Labour Organization*)

menunjukkan partisipasi kerja perempuan di India dalam sektor non-agrikultur mengalami penurunan.

India menjadi negara yang memiliki mayoritas pekerja di sektor agrikultur, terutama pada perempuan di daerah rural. India merupakan negara yang terbagi atas dua wilayah besar, Utara dan Selatan. Namun, di beberapa negara bagian, sektor agrikultur telah terberdaya dengan baik, contohnya di India Selatan. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan berprofesi sebagai petani atau bekerja di sektor agrikultur, lebih memahami pengelolaan pertanian, terutama pada perempuan. Sementara perempuan yang berada di bagian utara India lainnya, lebih banyak perempuan yang berprofesi sebagai petani namun sebagai pekerja kasar. Daerah ini meliputi Bihar, Uttar Pradesh, dan Uttarakhand. Selain itu, bagian selatan India permasalahan perempuan lebih banyak disebabkan pada ketimpangan gaji yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan. Perbedaan kondisi sosial yang menonjol dari dua wilayah tersebut adalah pada data Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga di tahun 2024, wilayah Utara dengan penduduk lebih banyak dibandingkan dengan Selatan menunjukkan wilayah tersebut lebih miskin. Sementara pembangunan, sasaran pemberdayaan, dan melek teknologi lebih banyak dikuasai di wilayah selatan India (Navhind Times, 2024).

Konstruksi sosial yang mengakar di India Utara menelan lebih banyak nilai-nilai maskulinitas dan patriarki berdasar pada sistem agrikultur di daerah tersebut. Hal ini berkaitan dengan sejarah kolonisasi dan modernisasi di masa penjajahan Inggris. Mengenai sektor agrikultur, India Utara dengan konstruk

sosial yang tinggi, mengotak-ngotakkan perempuan berdasar pada kepemilikan tanah. Banyak perempuan yang tidak memiliki tanah pertanian, bekerja pada lahan keluarga atau orang lain akan dianggap sebagai ‘kewajiban’ dan tidak jarang mendapat upah rendah. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi India Selatan yang mengalami kondisi ‘lebih baik’ pada sektor agraria (Sharma, 1984). Oleh karena itu, utara India menjadi justifikasi pemberdayaan perempuan di bidang agraria. Pada dasarnya, sektor agraria di India menjadi penyokong ekonomi terbesar di India. Namun, ketimpangan angka partisipasi pekerja perempuan dan laki-laki yang menjadi problematika pada fenomena ini. Perempuan menjadi tulang punggung pada sektor agrikultur yang banyak tersebar di daerah rural India, dimana pada tahun 2019-2020 terdapat sebanyak 80% perempuan berada pada sektor agrikultur (FLO by FICCI, 2020).

Pemerintah India berupaya dalam mengeluarkan undang-undang dan program yang mendukung kesetaraan dan problematika ketimpangan yang dialami oleh perempuan India dalam isu mobilisasi profesi ini. Undang-undang National Policy for Farmers dan National Policy for Women menjelaskan upaya pemerintah dalam membuka kesempatan bagi perempuan untuk bergerak lebih luas. Namun, hingga saat ini fenomena tersebut masih berlangsung, aktor non-negara hadir sebagai perpanjangan tangan daripada program dan undang-undang pemerintah tersebut. Keterlibatan aktor non-negara berupaya mengadvokasi isu-isu kemanusiaan dan memberikan peran kunci terhadap kemakmuran masyarakat, dalam kata lain aktor non-negara memberikan bantuan kepada pemerintah suatu negara dalam menangani permasalahan

domestik yang tidak mampu diemban oleh satu pihak. Seiring berkembangnya isu kontemporer, peran serta NGO (*non governmental organization*) semakin masif dan efektif dengan memberikan program pengembangan atau *development programme* yang menysasar pada masyarakat tertentu. Isu kesetaraan gender menjadi populer di kalangan masyarakat internasional karena tingginya intensitas isu tersebut dalam pengawalan advokasi NGO.

Keterlibatan feminis dalam pergerakan NGO telah berlangsung lama di India. Mulai tahun 1980-an, terdapat kelompok semi-NGO yang turut serta dalam pembangunan negara melalui bidang pendidikan dan pemberdayaan bernama Mahila Samakhya (MS). Pada tahun tersebut, Mahila Samakhya memiliki kesulitan dalam menjalin hubungan dengan pemerintah India. Namun, terdapat bias didalam isu yang diangkat oleh NGO bersama pemerintah. Organisasi tersebut menyadari bahwa ketika terdapat campur tangan elitis di dalam pengawalan isu, maka muncul bias gender, kelas sosial, dan kewilayahan. Program Mahila Samakhya ini mendasari bahwa keterlibatan feminis dalam NGO diperlukan untuk mengawali gerakan sosial baru yang merepresentasikan kekuatan perempuan dan kesetaraan gender secara independen (Bernal & Grewal, 2014).

Pada problematika partisipasi perempuan di sektor agrikultur, NGO sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah melakukan upaya dalam advokasi mereka untuk memberdayakan perempuan pada sektor ketenagakerjaan. Program ini akan berbasis pada prinsip *livelihood*, yakni kemampuan atau aktivitas yang mendukung seseorang mencapai kesejahteraan (Serrat, 2008). Dimana

livelihood termasuk pada bagaimana perempuan mendapatkan akses optimal terhadap pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Pada wilayah utara India, Bihar menjadi salah satu daerah yang memiliki fokus pada partisipasi perempuan dalam sektor agrikultur, dimana pertanian dan peternakan domestik menjadi sumber mata pencaharian primer bagi masyarakat setempat. Perempuan terlibat pada presentase 90% pada partisipasi kerja di wilayah Bihar, yang diartikan bahwa laki-laki lebih banyak bekerja di sektor non agrikultur, sehingga tidak ada kekangan bagi laki-laki dalam melakukan migrasi dibanding perempuan (Centre for Catalyzing Change, 2022).

NGO bersama advokasi kesetaraan gender dan inklusivitas, bergerak di Bihar dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang optimal di bidang agraria. Aga Khan Rural Support Programme (AKRSP) India merupakan organisasi non-pemerintah yang memiliki lokus di India Utara. Program yang digerakkan oleh AKRSP (I) di sektor agrikultur adalah bantuan sanitasi dan irigasi, serta perluasan agrikultur dan institusi pertanian. Program ini dijalankan berdasar pada prinsip pemberdayaan dan keadilan (Aga Khan Rural Support Programme (India), 2024). Selain itu, *Centre for Catalyzing Change* (C3) juga merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak pada akselerasi gender dan pembangunan di wilayah Bihar. C3 menemukan bahwa perempuan terjebak pada pekerjaan sebagai petani dan pekerjaan domestik lainnya tanpa didasari pada keadilan dan upah yang sesuai. Lain hal dengan laki-laki yang mudah melakukan perpindahan profesi, perempuan di Bihar sulit melakukan migrasi tersebut (Centre for Catalyzing Change, 2024). *FLO by Federation of Indian*

Chambers of Commerce and Industry (FICCI) merupakan organisasi pemberdayaan masyarakat melalui sektor kewirausahaan yang juga turut memberikan fokus pada perempuan sektor agrikultur dalam forum nasional. FLO bergerak pada prinsip pemberdayaan ekonomi pada perempuan, dimana hal ini menjadi linier dengan asumsi *livelihood* dalam memperkuat kemampuan perempuan dalam mengedepankan pemahaman terhadap agrikultur di ranah ekonomi (FLO by FICCI, 2024). Hadir pula CARE India yang menjadi bagian dari konfederasi CARE International dalam meluncurkan program *livelihood* pada petani perempuan India di wilayah utara India khususnya. CARE memiliki program khusus yang bergerak di Gujarat, yakni *Secure and Resilient Livelihoods for Smallholders Farmers*. Organisasi non-pemerintah tersebut berfokus pada memutus lingkaran perempuan dalam sulitnya akses pekerjaan yang layak dan mampu menghancurkan permasalahan sosio struktural dan historikal yang menjadi efek domino.

Oleh karena sulitnya perempuan dalam akses pekerjaan, isu ketimpangan dan ketidaksetaraan juga turut menjadi advokasi NGO di India, terutama dalam pengawalan isu di pedesaan, khususnya India Utara. Organisasi tersebut mewadahi perempuan dalam mengatasi warisan masa lampau yang memunculkan diferensiasi kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Sistem kasta sebagai representasi dinding sosio-struktural pada warisan kolonial yang telah mengakar di India sebelum dan sesudah penjajahan Inggris, berdampak pada mobilisasi sosial oleh perempuan kelas bawah, sehingga tiga organisasi tersebut berusaha untuk menghilangkan partisi tersebut melalui

kesempatan bekerja yang sama dengan laki-laki melalui pelatihan bisnis, pemberdayaan petani perempuan, bantuan terhadap perempuan tunawisma. Program-program yang dibangun ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak yang sama terhadap perempuan India yang mengalami ketidaksetaraan. Melalui advokasi yang berbasis pada pemenuhan nilai-nilai *livelihood*, hal ini menjadi tujuan bagi AKRSP (I), C3, dan CARE India dalam menumbuhkan ekosistem positif dalam menyediakan kesempatan bagi perempuan dalam berkarir dan secara legalitas turut mengadvokasi hak perempuan India yang tersingkirkan perihal profesi di India Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran NGO melalui program *livelihood* menekan permasalahan ketimpangan gender dalam kesempatan mobilitas profesi yang dihadapi oleh perempuan di India Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran terhadap demografi perempuan India dalam permasalahan ketimpangan mobilitas profesi. Selain itu, tujuan khusus penelitian ini adalah menjelaskan optimalisasi NGO CARE India, *Aga Khan Rural Support Programme* (AKRSP) India, dan *Centre for Catalyzing Change* (C3) yang bergerak di India terhadap ketimpangan mobilitas profesi dalam kerangka pikir feminis poskolonial dan gender dalam pembangunan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat akademis penelitian ini adalah menjadi sumber rujukan dan preferensi pembaca mengenai ide penelitian yang memuat lingkup gender dan *non-governmental organizations*. Manfaat praktis penelitian adalah membuka cakrawala baru dalam melihat isu gender dan perkembangan perempuan melalui program *livelihood* dalam spektrum feminis poskolonial.

1.5. Tinjauan Pustaka

Studi literatur yang digunakan sebagai tinjauan pustaka penelitian ini adalah penelitian dari Kathleen O'Reilly dalam *Resolving a Gendered Paradox Women's Participation and the NGO Boom in North India* (2014), Sheeva Yamunaprasad Dubey dalam *Women at the Bottom in India: Women Workers in the Informal Economy* (2016), Indah Permatasari Rafiun dalam *Pengaruh CARE India Dalam Upaya Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender di India* (2020), dan Aparajita Dasgupta dan Ashokankur Datta dalam *Are Gender Norms Systematic to Caste Institutions? Examining Preferences Through a Social Experiment in India* (2022).

Menurut O'Reilly (2014) terdapat paradoks dalam agenda pembangunan perempuan dan advokasi NGO, dimana cita-cita untuk mensejahterakan perempuan yang terbelakang dalam aspek ekonomi dan sosial tidak tercapai, melainkan aspirasi perempuan yang terjaring dalam NGO itu sendiri yang justru mampu terwadahi dalam mewujudkan perubahan dan partisipasi perempuan. O'Reilly (2014) menyorot pada partisipasi perempuan terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh kelompok non formal dalam pemberdayaan perempuan

di sektor pekerjaan. Misalnya program Our Water yang ditujukan untuk menyediakan sanitasi dan pelayanan kesehatan tepat guna kepada masyarakat India Utara, dimana aktivitas sosial tersebut didominasi oleh partisipasi perempuan. O'Reilly (2014) menggunakan pandangan post strukturalisme dalam pandangannya terhadap partisipasi perempuan melalui diskursus, ruang, dan dialog (O'Reilly, 2014).

Sejalan dengan O'Reilly (2014), Dubey (2016) berpendapat bahwa perempuan mengalami ketidakadilan tidak hanya pada kelas dan gender, melainkan pada kasta dan agama yang disebut sebagai perempuan di kelas terbawah. Perempuan mendapatkan pekerjaan mayoritas hanya pada sektor informal karena keterbatasan akses yang diperoleh. Selain itu, Dubey (2016) menekankan pada tantangan yang dimiliki oleh perempuan dari kelas dalit dan beragama muslim bahwa persoalan yang seringkali menimpa kelompok dalit adalah pekerjaan informal yang sulit untuk ditangani. Sementara itu, tulisan ini mengambil premis feminis dengan sudut pandang perempuan dalit serta suku dan agama yang membahas bahwa feminis dalit lebih memerhatikan pada kesejahteraan perempuan pada isu-isu pekerja dibanding dengan feminis kesukuan dan agama (Dubey, 2016).

Sementara Rafiun (2020) kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di India diakibatkan oleh faktor sosiokultural yang mengakar di India, bagaimana ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki dalam ranah domestik mengalami diskriminasi berdasarkan seksualitas. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi keterbelakangan India akibat kurangnya akses perempuan untuk

bekerja di sektor industri. Kekerasan yang didapatkan oleh perempuan tidak hanya fisik melainkan emosional. Tulisan ini menggunakan aktor internasional organisasi non-pemerintah sebagai subjek penelitian. Dimana organisasi ini memastikan bahwa perempuan India memiliki perlindungan penuh atas kekerasan yang dilayangkan laki-laki melalui program pemberdayaan (Rafiun, 2020).

Sebagai penutup, Dasgupta dan Datta (2022) mengidentifikasi benang merah antara kasta, gender, dan kelas sosial yang menghasilkan isu feminitas saat ini. Berdasarkan pada keadaan sosiokultural yang mengakar di India, penelitian ini mengambil studi kasus di India Utara dengan menganalisis bagaimana keterkaitan variabel tersebut dapat menghasilkan suatu isu gender di India. Dasgupta dan Datta berpendapat bahwa sistem kasta di India terkait pada norma gender yang dibangun di masyarakat, yakni semakin tinggi kasta maka kekakuan praktik gender di sektor rumah tangga akan semakin kental. Sementara norma gender mempengaruhi pada kelas sosial dalam aktivitas ekonomi, dimana elaborasi dari ketiga variabel tersebut akan menghasilkan pada ketidaksetaraan lapangan kerja terhadap perempuan (Dasgupta & Datta, 2022).

Menggunakan model kronologis yang disusun sesuai dengan tahun perilisan, keempat literatur tersebut berfokus pada ketimpangan gender yang terjadi secara struktural di India. Penelitian milik O'Reilly (2014) dan Rafiun (2020) terfokus pada partisipasi kelompok informal, yakni NGO dalam mengadvokasi isu kekerasan terhadap gender dan pemberdayaan perempuan

dalam masalah kesehatan di wilayah rural India. Sementara Dubey (2016) dan Dasgupta dan Datta (2022) meneliti pada rendahnya akses terpadu pada pembangunan ekonomi terhadap perempuan yang berada di kasta paling bawah. Feminis mengidentifikasi pada isu kesejahteraan ekonomi pada perempuan kelas dalit serta membedah hubungan antara sistem kasta dan gender konservatif di India yang mempengaruhi kelas sosial. Namun, penelitian O'Reilly (2014) dan Rafiun (2020) tidak terlihat berorientasi terhadap teori sebagai pisau analisis topik penelitian. Sementara peneliti menelisik unsur feminis dan warisan colonial dalam menganalisis ketimpangan mobilisasi pekerja perempuan yang terbelenggu oleh gender dan kelas sosial. Selain itu, penelitian Dubey (2016) dan Dasgupta dan Datta (2022) berfokus pada program NGO yang secara khusus memberdayakan perempuan dalam isu kesehatan, sementara peneliti menelisik partisipasi NGO yang bergerak dalam pengadvokasian mobilisasi perempuan dalam sektor pekerja dan hal tersebut menjadi subjek penelitian dalam menggabungkan variabel penelitian. Analisa tersebut menjadi *State of the Art* dari penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada teori feminis yang mengerucut pada warisan kolonialisme di India dan melihat isu perempuan di negara-negara Dunia Ketiga, terutama permasalahan ketimpangan mobilisasi pekerjaan.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Feminisme Poskolonial

Teori turunan dari Feminisme adalah Feminisme Poskolonial yang masuk kedalam feminis gelombang ketiga. Teori Feminisme Poskolonial yang

digunakan meminjam pemikiran dari aktivis feminis asal India, Chandra Talpade Mohanty. Melalui tulisannya yang berjudul *Under Western Eyes* (1984), Mohanty mengkritik bagaimana pemikir feminis Barat mengkonstruksikan pandangan mereka terhadap perempuan di negara-negara Dunia Ketiga. Feminis Barat mengelompokkan perempuan-perempuan di negara Dunia Ketiga sebagai suatu monolit, yakni kelompok yang memiliki kekuatan dan pengaruh, terlepas dari etnis, ras, agama, atau kelas yang ada di masyarakat. Mohanty mengkritik bahwa hal tersebut merupakan suatu dekonstruktif sehingga perempuan di Dunia Ketiga tidak bisa disamaratakan kebutuhannya karena antara satu negara atau suatu wilayah akan berbeda dengan yang lain. Pengelompokkan yang paling dikritisi oleh Mohanty adalah mengenai pembagian kelas pekerja berdasarkan jenis kelamin atau seksual, Mohanty berpendapat bahwa hal tersebut sangat menjelaskan subordinasi yang ada di lingkungan sosial, tetapi harus diteliti lebih dalam lagi karena pengelompokkan tersebut tidak dapat digeneralisir, harus ada konteks yang menjadi bahan acuan (Mohanty, 1984, 333-356). Dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemikiran Mohanty terhadap feminisme poskolonial berfokus pada mengedepankan gagasan mengenai perempuan Dunia Ketiga dalam berpikir mengenai ras, kelas, gender, dan hubungan politik untuk melawan praktik rasisme, seksisme, kolonialisme, imperialisme, dan monopoli kapitalisme (Mohanty, 2022, 66-77).

Aliran feminis poskolonial lahir pasca berakhirnya feminis gelombang kedua dan munculnya gelombang ketiga. Interseksi antara frasa feminis dan

poskolonial terletak pada etnis dan perempuan kulit berwarna terhadap premis gender di gelombang kedua. Feminis poskolonial dalam gelombang ketiga disebut sebagai generasi baru dan fokus pada kritik ini adalah bagaimana perempuan pada level mikro mampu mengungkap penindasan eksternal dan internal yang membatasi kehidupan perempuan. Selain itu, kritik ini juga fokus pada upaya perlawanan mereka dalam tekanan kelas dan identitas (Mann & Huffman, 2005). Sejalan dengan premis tersebut, menurut Piedalue dan Rishi, feminis poskolonial merupakan kritik terhadap ras, gender, seksualitas, dan kelas sosial yang dibangun melalui kacamata imperialis di negara-negara selatan. *Southern theory* yang dikembangkan dalam pemahaman Piedalue dan Rishi merupakan kritik feminis poskolonial terletak pada geografi suatu negara dan ide yang berkembang di wilayah terimperialis dalam spektrum politik, ekonomi, dan sosial. Terdapat relasi kuasa dalam feminis poskolonial yang terjadi di negara-negara selatan yang dipotret melalui praktik imperial barat dalam ketidaksetaraan skala global maupun lokal (Piedalue & Rishi, 2017). Menurut Piedalue dan Rishi (2017) relasi kuasa tersebut mencakup dua hal, yakni ideologi dan hegemoni kulit putih (*patriarchal white sovereignty*). Ideologi yang dibangun berupa paradigma yang menganggap selatan sebagai negara *underdeveloped*, *third world*, atau *developed*, sementara nilai yang disebarkan oleh Europe-American adalah negara barat merupakan pusat pengetahuan dan kemajuan pendidikan. Namun hal ini dikritik oleh Piedalue dan Rishi bahwa nilai barat sarat dalam mendiskreditkan isu rasial dan gender. Hal ini berkaitan dengan relasi kuasa yang kedua, yakni hegemoni kulit putih

atau *patriarchal white sovereignty*, dimana kelompok tersebut menjadi suatu kebanggaan dan simbol terhadap kedaulatan atas tanah yang mereka duduki, sehingga berimplikasi terhadap penduduk pribumi dengan merendahkan ras dan gender mereka (Piedalue & Rishi, 2017).

Sementara itu, di lain sisi pemahaman atas feminis poskolonial adalah terdapat keterkaitan antara kasta, kelas sosial, dan norma gender yang dibangun di masyarakat India dan mengakar hingga saat ini. Dalam konstruksi sosial yang dibangun dan dipercaya oleh kaum tradisionalis India, semakin tinggi kasta yang diemban, maka semakin ketat norma masyarakat terhadap mobilitas perempuan. Hal tersebut dikarenakan “*purity of women is Brahminical patriarchy*” yang diartikan sebagai perempuan harus menjaga kesuciannya sebagai perempuan sampai dengan menikah. Oleh karena itu, perempuan menarik diri pasca menikah karena status kasta yang membaik sehingga ada Sanskritisasi dimana kasta rendah akan mengadopsi norma gender kasta atas untuk memperoleh status sosial lebih tinggi (Dasgupta & Datta, 2022). Sementara itu, kaitannya dengan unsur poskolonial terhadap fenomena ini adalah Inggris pada masa pemerintahannya memanfaatkan nilai sosial dan budaya tersebut untuk mengeksploitasi perempuan dalam sektor pekerjaan.

1.6.2. Women in Development

Konsep kedua yang digunakan adalah konsep *women in development* (WID). Strategi WID pertama kali diusung oleh *United States Agency for International Development* dengan premis dasar bahwa perempuan merupakan sumber daya manusia yang patut diikutsertakan dalam pembangunan

internasional. Konsep ini melatarbelakangi ketimpangan lapangan kerja yang didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan dianggap tidak memiliki kapabilitas didalamnya. Pandangan ini memfokuskan pada kebijakan dan program kepada perempuan dalam proses pembangunan ekonomi, menekankan pada keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dan mengurangi atau menghapuskan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan di sektor produksi (Wiratuningsih & Kusumawati, 2014, 4-5).

Selain itu, United Nations juga mengusung pemahaman mengenai Women in Development bahwa WID tidak hanya mementingkan kondisi perempuan dan kelompok rentan, namun laki-laki juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh keuntungan dan kesempatan dalam mengambil keputusan. Dalam topik *female labour force participation* (FLFP), WID peduli terhadap keikutsertaan perempuan dalam menjelajah segala bentuk pengalaman, kreatifitas, dan *skill*, sebab partisipasi perempuan di sektor industri memiliki relevansi dalam kemajuan ekonomi. WID menekankan pada pentingnya peran perempuan dalam menghadapi disparitas gender yang seringkali ditemui di kehidupan sosial terutama lingkungan kerja melalui kesempatan mobilisasi. Perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pengembangan diri (United Nations, 1992).

Isu kontemporer terhadap gender yang saat ini dihadapi secara global membutuhkan kolaborasi antara pemerintah sebagai *decision maker* dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai harmonisasi dalam advokasi isu gender di masyarakat. Kelompok selain pemerintah yang memiliki tujuan terhadap

keadilan sosial adalah bentuk aktivisme masyarakat yang melingkupi skala global maupun lokal, kelompok ini disebut dengan *transnational advocacy network* (TAN). Jaringan aktivisme ini berperan sebagai aktor non-negara dengan berupaya menjembatani dialog dan solusi yang dihadapi masyarakat sipil mengenai isu “akar rumput” seperti isu gender, lingkungan, atau hak asasi manusia. TAN di seluruh dunia terjaring satu sama lain dan membangun nilai dan idealisme, serta terintegrasi secara internasional. Salah satu bagian dari TAN adalah NGO yang memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional (Keck & Sikkink, 1999). Dalam advokasi isu secara khusus, NGO memiliki keterlibatan dalam agenda pembangunan terhadap perempuan di dunia, sebab nilai-nilai tradisional yang dianut oleh NGO adalah melakukan persuasi dan promosi kepada pemerintah sebagai garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama perempuan. NGO memiliki peran dalam hal advokasi, pendidikan, dan pelatihan, serta memonitor tujuan yang sudah atau belum tercapai dalam misi pembangunan perempuan (Haslegrave). Partisipasi NGO dalam pembangunan juga terlihat dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing. NGO mempengaruhi politik global dunia dengan mengikutsertakan isu perempuan sebagai indikator pembangunan bersama dengan Commission on the Status of Women (CSW). Oleh karena konferensi tersebut, NGO menjadi perhatian dunia dan berada di garis depan aktivisme feminis telah dimulai (UN WOMEN, n.d.).

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

Gender dan NGO

Gender merupakan konstruksi sosial yang dibangun masyarakat dalam mendefinisikan perempuan dan laki-laki, namun gender berbeda dengan seksualitas yang memisahkan jenis kelamin berdasarkan biologis. Gender membangun pemahaman terhadap laki-laki dan perempuan melalui bentuk feminitas dan maskulinitas. Menurut Miller (2001) perempuan didefinisikan sebagai feminitas karena konstruksi yang dibangun adalah perempuan "*life-giving*" yang ditunjukkan oleh karakter lemah lembut, penuh kebaikan, kesabaran, kepedulian, dan memberikan perawatan. Sementara laki-laki disebut sebagai kelompok maskulinitas karena melambangkan hal yang kontras terhadap perempuan, yakni "*life-taking*" bahwa laki-laki menumbuhkan karakter kejam, kemarahan, dominasi dan memiliki naluri pembunuh (Miller, 2001).

Oleh karena itu, perempuan terbelakang berupaya menyuarakan permasalahan yang mengakar di negara mereka melalui sektor informal, yakni NGO. Organisasi non-pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawal advokasi yang linier dengan permasalahan perempuan, sebab perkembangan NGO dengan isu feminis telah ada sejak lama dengan perhatian isu yang sama dengan isu-isu selain gender. Kebangkitan feminis gelombang ketiga di India mendapatkan perhatian khusus dari NGO yang bergerak bersama dengan advokasi terhadap isu gender bahwa terdapat

perkembangan baru antara penelitian dan isu-isu baru gender terhadap relasi kuasa dengan konsentrasi pada NGO lokal maupun internasional yang fokus pada kesejahteraan perempuan (Bernal & Grewal, 2014).

Power Relation dalam Feminis Poskolonial

Perkembangan isu gender semakin masif di seluruh dunia, salah satunya adalah negara-negara Selatan. Feminisme Poskolonial dari Chandra Talpade Mohanty menurunkan pada konsep relasi kuasa, yakni suatu keadaan dimana seseorang memiliki kekuatan atau kemampuan dalam membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan seseorang tersebut. Dalam tulisan *Under Western Eyes* (1984), Mohanty menjelaskan bahwa relasi kuasa yang dimaksudkan adalah konteks sumber kekuasaan dan reaksi kumulatif terhadap kekuasaan. Hal ini menjadi fenomena umum yang tercipta sebagai respons terhadap kekuasaan, yang pada gilirannya dimiliki oleh kelompok orang tertentu. Masalah utama dengan definisi kekuasaan seperti itu adalah bahwa ia mengunci semua perjuangan revolusioner ke dalam struktur biner, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan versus mereka yang tidak berdaya (Mohanty, 1984). Berdasarkan konsepsi yang telah disebutkan dalam kerangka teori, bahwa relasi kuasa dalam spektrum feminis poskolonial mengacu pada penyebaran ideologi dan hegemoni kulit putih, sehingga isu ras dan gender di negara terkolonialisasi menyebabkan kerugian bagi perempuan-perempuan dan dirasakan hingga saat ini.

1.7.2. Definisi Operasional

Gender dan NGO

Gender erat kaitannya dengan peran NGO, khususnya pada mobilisasi profesi perempuan di sektor publik. Hal ini selaras dengan argumen Miller (2001) mengenai konsepsi gender perempuan dan laki-laki dalam “*life-giving*” dan “*life-taking*”, isu gender terlihat dalam pemisahan tugas pokok yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan melalui pembagian kerja secara seksual, dimana terdapat relasi kuasa dalam distribusi ruang kerja perempuan dibatasi hanya di rumah tangga, namun laki-laki diperluas ke ruang publik. Oleh karena ketimpangan gender di sektor pekerja, perempuan sulit dalam mengembangkan potensi diri akibat keterbatasan tersebut (Miller, 2001). Hadirnya permasalahan ketenagakerjaan dimana perempuan bergerak terbatas pada sektor agrikultur dan domestik di India Utara, diupayakan oleh NGO bahwa perempuan bergerak melalui sektor informal yakni CARE India, AKRSP (I), dan C3 yang secara khusus beradvokasi pada *livelihood*.

Selain itu, gerakan advokasi gender sebagai subjek dari pengembangan perempuan sehingga narasi yang berusaha dibangun oleh Bernal dan Grewal (2014) berupa NGO yang tergenderisasi. NGO yang bergerak di India Utara menjadi sentralitas dalam penelitian ini, sebab advokasi NGO dalam isu gender di India Utara telah meluas dan bertransformasi kedalam berbagai upaya pemberdayaan perempuan yang mengalami disparitas dalam hubungan sosial. Menurut Bernal dan Grewal

(2014) peran NGO sebagai aktor non-negara dan mitra pemerintah berupaya mengikutsertakan partisipasi perempuan dalam advokasi gender dan emansipasi perempuan melalui program-program pembangunan yang dilakukan oleh NGO. Oleh karena itu, perempuan di India Utara yang bergerak pada sektor agrikultur dan menemui kebuntuan dalam akses mobilitas profesi, tidak hanya dijadikan objek dalam pembangunan negara, melainkan sebagai subjek dari program NGO, sehingga bentuk ideal dari perjuangan perempuan mampu terwadahi secara utuh (O'Reilly, 2014).

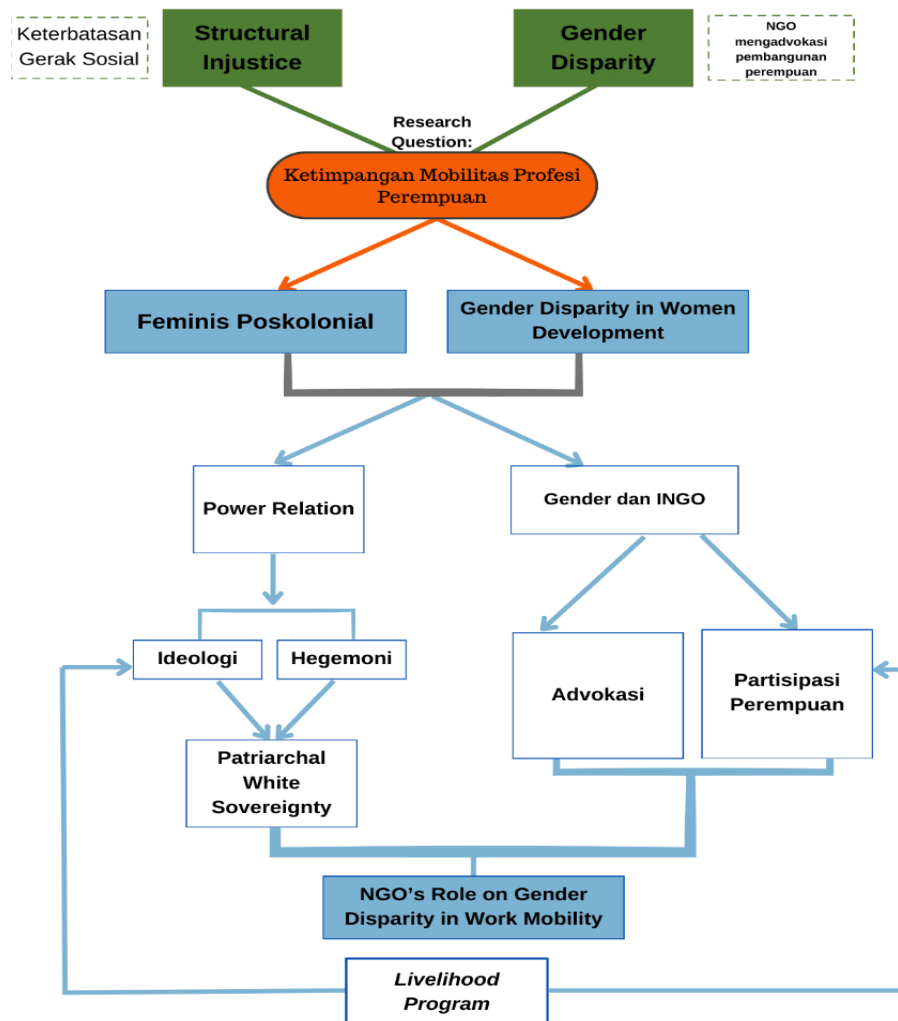
Power Relation

Power relation yang hadir sebagai dampak dari kolonialisasi memberikan efek domino pada pembangunan perempuan di masa kini. Sebagai konsep turunan dari feminisme poskolonial, relasi kuasa memanfaatkan struktur dan fungsi sosial negara yang terjajah sehingga nilai-nilai yang menjadi dogma negara barat dapat ikut mengakar bersama konstruk sosial di masyarakat. Oleh karena itu, perempuan menjadi tidak berdaya dalam lingkup masyarakatnya. Dalam operasionalisasinya, relasi kuasa berdasarkan Mohanty (1984) menunjukkan bahwa perempuan berperang melawan kelas dan kasta sosial di masa penjajahan Inggris dalam upayanya mendapatkan keadilan di sektor ketenagakerjaan (Mohanty, 1984).

Power relation yang merupakan produk dari kolonialisme Inggris, dalam pandangan feminis poskolonial terbentuk dari warisan kolonial Inggris sebagai penjajah sehingga memiliki peran penting dalam

perkembangan ekonomi dan pembangunan India pada masa penjajahan, dimana perempuan di wilayah Utara mendapatkan ketimpangan pembangunan ekonomi akibat penetrasi kolonialisme yang mengecilkan perempuan dengan memanfaatkan struktur sosial pedesaan India. Hal ini menjadi titik perubahan bagi permasalahan ketenagakerjaan India terhadap partisipasi perempuan yang disebabkan oleh relasi kuasa oleh Inggris terhadap masyarakat India (Sharma, 1984). Sehingga bagaimana relasi kuasa yang menjadi produk dari warisan kolonial tersebut melanggengkan sulitnya perempuan India Utara dalam memperoleh keadilan aksesibilitas mobilisasi.

1.7.3. Alur Pemikiran



Gambar 1.1 Alur Pemikiran

Sumber: dibuat oleh penulis, 2024.

1.8. Argumentasi Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan teori pendukung, peneliti berargumentasi bahwa ketimpangan struktural di India yang dipengaruhi oleh faktor sosiokultural dan warisan kolonial memberikan dampak jangka panjang terhadap kesetaraan mobilitas pekerjaan antara perempuan dengan laki-laki di India. Permasalahan kontemporer ini mempengaruhi perkembangan pemikiran

feminis di India sebagai warisan kolonial dalam negara dunia ketiga. Oleh karena itu, hasil analisis dari peran serta NGO yang bergerak di India Utara melalui program *livelihood* dapat menekan disparitas gender yang disebabkan oleh dinding warisan tersebut dengan berorientasi terhadap pembangunan dan partisipasi perempuan dalam advokasi kesetaraan kesempatan mobilitas profesi terhadap perempuan India Utara.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada penyimpulan proses analisis data melalui teknik deduktif atau induktif terhadap dinamika hubungan antar fenomena (Azwar, 2007, 5)

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah deskriptif, yakni tipe yang mencoba menjawab pertanyaan dari suatu permasalahan penelitian melalui penjelasan suatu proses yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian yang digunakan dalam analisis penelitian ini bertempat di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini berfokus pada organisasi internasional non-pemerintah atau NGO yang bergerak di lokus India Utara, yakni CARE India, Centre for Catalyzing (C3), dan AKRSP (I).

1.9.4. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data terbagi dua, yakni data primer yang merupakan perolehan data melalui pihak pertama, seperti wawancara atau observasi. Kemudian, data sekunder yang diperoleh melalui pihak kedua, seperti buku, data laporan, dan data dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik data sekunder, yakni mengumpulkan data melalui website pemerintah dan sumber pertama, buku, artikel jurnal, maupun berita yang mencakup pada topik penelitian (Azwar, 2007, 91).

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni menghimpun data pendukung penelitian melalui dokumen tertulis atau digital, gambar, karya-karya, kebijakan, atau laman berita yang memuat topik penelitian (Sugiyono, 2013). Data-data yang terhimpun dikumpulkan melalui *desk research*. Teknik ini biasa disebut juga dengan *secondary research* yang merupakan proses pengolahan data berupa laporan, artikel jurnal, berita, maupun situs web yang diolah menjadi data penelitian.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan penelitian ini adalah melalui metode analisis Miles dan Huberman (1994). Setelah data berhasil dikumpulkan, maka analisis data menggunakan teknik siklus kualitatif dalam tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

1.9.7. Kualitas Data (goodness criteria)

Untuk menjamin keabsahan dan objektivitas pada penelitian ini, peneliti memperoleh data pada sumber pertama. Data yang disajikan pada penelitian ini menggunakan studi literatur, melalui jurnal, buku, dan report. Oleh karena itu, hasil penelitian yang didukung oleh data sekunder dari sumber yang resmi ini bersifat kredibel.